REFERENCES

Books:

Andi Fahmi Lubis, et.al., *Hukum Persaingan Usaha antara Teks dan Konteks*, Penerbit KPPU, Jakarta, 2009.

Advendi Simanunsong dan Elis Kartika Sari, *Hukum dalam Ekonomi*, Grasindo, Jakarta, 2007.

A. M. Tri Anggraini, "Penegakan Hukum dan Sanksi dalam Persekongkolan Penawaran Tender", Jurnal Legalisasi, 2007. hlm. 1.

Dahlan dan Sanusi Bintang, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia,* Djambatan, Jakarta, 2007.

Johnny Ibrahin, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia*, Banyumedia, Malang, Jawa Timur, 2009.

J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001.

Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata: Class Action, Arbitrase & Alternatif serta Mediasi*, cet. 5, PT Grafitri Budi Utami, Bandung, 2007.

KPPU, *Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* Cetakan ke-IV, Jakarta, 2007.

Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Ctk. Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Nurmadjito, Pakta Intergritas, Legal Review 28/TH III, Januari 2005. hlm. 35 sebagaimana dikutip Mohammad Birowo Karnan, *Peranan Notaris Dalam Persekongkolan Tender Barang/Jasa Pemerintah Terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Tesis, FH USU Medan, Tidak Dipublikasikan, 2012.

Yakum Adi Krisanto, "Analisis Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan KPPU tentang Persekongkolan Tender", *Jurnal* Hukum Bisnis, vol. 24 Nomor II, 2005.

Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia,* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia,* FH Ull PRESS, Ctk. Pertama, Yogyakarta, 2006.

Rocky Marbun, *Tanya Jawab Seputar Barang dan Jasa Pemerintah,* Transmedia Pustaka, Jakarta, 2010.

R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dari Proses Persidangan,* cet. 6, Sinar Gratika, Jakarta, 2004.

Siti Anisah, *Bahan Kuliah Hukurn Persaingan Usaha*, FH UII, Yogyakarta, 2010.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003.

Udin Silalahi, *Perusahaan saling mematikan dan bersekongkol*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2007.

Yakub Adi Krisanto, *Analisis Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Karakteristik Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Persekongkolan Tender* (dalam jurnal Hukum Bisnis, Vol. 24 Tahun 2005.

Regulations:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Keputusan Menteri Agama Nomor 392 Tahun 2003 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelengaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2002 tentang Tender Penjualan Saham PT IMSI.

Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2004 tentang Tender Penjualan Kapal VLCC PT Pertamina.

Putusan KPPU Nomor 09/KPPU-L/2008 Tentang Persekongkolan Dalam Tender Pengadaan Give Away Haji Tahun 2007.

Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010, Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Jakarta, 2005.

Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010. Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender, Jakarta, 2010.

Website:

http://www. Hukum On Line. *Persekongkolan dalam Tender yang Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. 12 August 2008.

http://www.Hukum On. Line, *Dua Perusahaan Bersekongkol Tender Haji*, tanggal 24 September 2008.

http://www.Hukum On. Line, *KPPU Hukum Dua Perusahaan Penyediaan Tas Haji*, tanggal 17 November 2008.

http://www. Hukum On Line. 26 November 2008.

http://www. *Pembacaan Putusan Komisi Pengawas Persangan Usaha Republik Indonesia*, Jakarta, 24 September 2008.

http://www. Hukum Online, Mochamad Yusuf Adidana, *Persekongkolan Tender Sebagai Suatu Tindakan yang Anti Persaingan Sehat*, 16 Januari 2008.

http://www. Hukum On Line. *KPPU Hukum Dua Perusahaan Penyedia Tas Haji*. tanggal 17 November 2008.

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/451/jbptunikompp-gdl-irpanpirma-22536-7-11babii.pdf, aspek hukum mengenai perlindungan konsumen dan perjanjian pada program invesatasi, 24 Mei 2011, 23:46.

http://legalitas.org/node/251, Penegakan Hukum dan Sanksi dalam Persekongkolan Penawaran Tender, diakses tanggal 1 Juni 2011, 08.00.